

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami (Hukum Pidana Islam)*, Jilid II, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1997, hlm. 351–365.

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I, hlm. 569–585;

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.

Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid II, Dar al-Ma'rifah, Beirut, hlm. 8–25.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 24.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 41.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2015.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 97.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 97.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 54–56.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 58–60.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 1999.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 487–489.

Gustav Radbruch, *Einführung di die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: KF Koehler, 1961.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 89.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, 2002.

Notoadmodjo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gunung Mulia, 1975.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, hlm. 420–430

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Kebebasan.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI, hlm. 145–160;

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Zudan Arif Fakhrullah, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal*, Tesis, Universitas Diponegoro, 1995.

B. Jurnal

Ahmad Mukhlis Fariduddin & Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, “Analisis Utilitarian terhadap Pidana Mati,” 2022.

Ahmad Mukhlis Fariduddin & Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia Dalam Perspektif Utilitarian,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2022.

Aziz Prasetio, Aturkian Laia, Bestari Laia, “Pidana Mati di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum,” *Panah Keadilan*, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2023.

Eva Achjani Zulfa, “Eksistensi Pidana Mati dalam KUHP Baru Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2, 2022, hlm. 245–247.

Eva Achjani Zulfa, “Pembaharuan KUHP dan Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023, hlm. 15.

Eva Achjani Zulfa, “Pembaharuan KUHP dan Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023, hlm. 19.

Eva Achjani Zulfa, “Pembaharuan KUHP dan Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023, hlm. 18.

Eva Achjani Zulfa, “Pembaharuan KUHP dan Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023, hlm. 20.

Eva Achjani Zulfa, “Pembaharuan KUHP dan Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023, hlm. 16.

Farah Rhesyfa Abril dan Muthoifin, “Analisis Pidana Mati di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Risalah*, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2024.

Fransiska Novita Eleanora, “Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Widya*, Vol. 29 Nomor 318 Tahun 2012.

Garry Fischer Simanjuntak, “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributif dan Teori Utilitarianisme di Indonesia,” *Pediaqu*, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2023.

Indah Lestari, Putu Riski Ananda Kusuma, dan Dewa Bagus Sanjaya, “Analisis Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023...,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 Nomor 3 Tahun 2024.

Irfan Harmain, dkk., “Diskrepansi Praktik Hukum Mati di Indonesia...,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 20 Nomor 1 Tahun 2025.

Lidya Suryani Widayati, “Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 175–194.

Lidya Suryani Widayati, “Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?,” *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 181.

Lidya Suryani Widayati, “Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?,” *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 176.

Lidya Suryani Widayati, “Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?,” *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 183.

Lidya Suryani Widayati, “Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?”, *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 181.

Lilik Mulyadi, “Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Baru,” *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2022.

Mahrus Ali, “Reorientasi Pidana Mati dalam KUHP Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 112–115.

Rais Abdurrahman Siregar, dkk., “Sistem Hukum Indonesia...,” *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8 Nomor 7 Tahun 2024.

Raissa Ramandhita, dkk., “Pidana Mati Menurut Filsafat Keadilan,” *Nusantara*, Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2025.

Regita Cahyani Prasetya & Hasna Afifah, “Implementasi Teori Retributif...,” *Al-Zayn*, Vol. 3 Nomor 6 Tahun 2025.

Syarif Saddam Rivanie, dkk., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2022.

Timothy Nugroho & Iqrak Sulhin, “Diskursus Normatif Pidana Mati...,” *Jurnal Hukum Maleo*, Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2022.

Yudhistira Cipta Ismara & Lagasakti Parwati Margaretha, “Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat...,” *Alethea*, Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2023.

C. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 98 dan Pasal 100.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Pasal 100 ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Staatsblad 1915 No.732.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100 dan Pasal 624 huruf c.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 dan Penjelasan Umum KUHP.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Pidana

Mati terhadap UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Pasal 64 dan Pasal 67.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme.

Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

